



Serapan APBD Terancam rendah

“Pemerintah Cuma punya 6 bulan menghabiskan Rp 62 triliun

JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2015 dua hari lalu. Pengesahan ini terlambat Empat bulan akibat konflik Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ihwal draf yang seharusnya disetujui Kementerian.

Karena sisa waktu yang pendek itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendesak agar pemerintah DKI segera melaksanakan program anggaran. “Harus langsung tancap gas,” kata Ketua Fraksi Golkar Ashraf Ali saat dihubungi Selasa lalu.

Ketua Fraksi Partai NasDem Bestari Barus juga mendesak hal serupa. Menurut dia, pemerintah tidak boleh lagi memakai alasan “serapan rendah” karena anggaran yang dikelola sudah menyerap kebutuhan eksekutif. “Tak ada lagi pemborosan akibat proyek tak jelas,” kata dia.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengingatkan keterlambatan pengesahan anggaran menyebabkan nilai serapan anggaran dipastikan rendah. “Hanya sege-lintir program APBD yang bisa dilaksanakan karena waktunya terbatas,” katanya.

Reydonnyzar mendasarkannya pada serapan anggaran tahun lalu yang menyisakan kas hampir separuh dari yang direncanakan. Tahun lalu, dari Rp 63,65 triliun, hanya Rp 37,76 triliun yang dibelanjakan untuk pelbagai program pembangunan atau sekitar 59,32 persen. Penerimaan pemerintah juga hanya Rp 52,17 triliun dari target Rp 72,9 triliun.

Dalam pidato pertanggungjawaban APBD 2014 pada Senin lalu, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan serapan rendah proyek itu disebabkan oleh efisiensi dan pengetatan dalam pengadaan barang dan jasa. “Pembebasan lahan juga belum dieksekusi karena belum sepakat harganya dengan pemilik,” kata dia.

Anak buah Basuki punya pendapat lain soal anggaran yang tak jadi dibelanjakan tahun lalu. Menurut Camat Tambora Mursidin, banyak hal teknis yang membuat anggaran terlambat digunakan. Hal teknis itu antara lain adanya duplikasi kegiatan, rincian tak lengkap, kode rekening yang salah, dan mepetnya waktu program. “Dan tahun lalu baru pertama kali menerapkan *e-budgeting* dan *e-catalogue*, sehingga tak semua paham,” katanya.

Mursidin mencotohkan, ketika ia menjabat Camat Kebon Jeruk, perbaikan jalan di wilayahnya bentrok dengan program serupa di Suku Dinas Bina Marga. Adapun honorarium forum komunikasi deteksi dini tak terlaksana karena kesalahan input kode proyek. “Sehingga anggaran tak cair,” ucapnya.

Lain lagi dengan Camat Cengkareng, Muhammad Ali. Dia mengatakan hambatan utama rendahnya serapan karena mepetnya pencairan APBD pada November 2014. Para camat hanya disediakan waktu hingga 15 Desember sebagai batas waktu penggunaan anggaran.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran memprediksi serapan anggaran Jakarta tahun ini tak lebih baik daripada tahun lalu. “Maksimal 60 persen, itu pun sangat sulit,” kata Sekretaris Jenderal Yenny Sucipto.

Yenny mengatakan faktor yang membuat serapan anggaran rendah adalah minimnya waktu pelaksanaan program. Ia menghitung pemerintah hanya punya waktu 6 bulan hingga tutup buku pada November nanti. “Anggaran yang dihabiskan puluhan triliun,” kata dia.

Belum lagi tender pengadaan yang memakan waktu sebelum pelaksanaan proyek. Menurut Yenny, waktu yang dibutuhkan dari pendaftaran tender hingga verifikasi perusahaan peserta paling tidak sebulan. Dengan begitu, waktu pengerjaan kian terpankas.

● RAYMUNDUS RIKANG | DINI PRAMITA